

**LAPORAN DELEGASI DPR-RI KE
SIDANG PLENO KE-8 ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY (APA)
7 – 12 DESEMBER 2015 DI PHNOM PENH, KAMBOJA**

I. PENDAHULUAN

Sidang Pleno ke-8 *Asian Parliamentary Assembly* (APA) telah berlangsung pada tanggal 7 - 12 Desember 2015 di Sokha Phnom Penh Hotel & Residence, Phnom Penh, Kamboja, dengan tema “*Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia*”. Sidang tersebut dihadiri 22 Negara Anggota APA dan 4 APA Observer Organizations.

A. Dasar Pengiriman Delegasi

Sidang Pleno ke-8 APA ini didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 30/PIMP/II/2015-2016 tanggal 1 Desember 2015.

B. Susunan Delegasi

Adapun nama-nama anggota delegasi adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Yth. Sdr. Dr. Agus Hermanto | Ketua Delegasi/Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang/ F-PD/ No. Anggota A-423 |
| 2. Yth. Sdr. H. Rofi' Munawar, Lc | Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/ F-PKS/ No. Anggota A-115 |
| 3. Yth. Sdr. Sumail Abdullah | Anggota Delegasi/ Anggota BKSAP/ F-P.Gerindra/ A-366 |
| 4. Yth. Sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc | Anggota Delegasi/ Anggota BKSAP/ F-PKS/ A-116 |

Selama mengikuti persidangan, Delegasi DPR RI didampingi oleh Pajabat dan Staff Sekretariat Jenderal DPR-RI; Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI; serta para wartawan, jurnalis dan kameramen dari TV Parlemen, Parlementaria, TV One dan Harian Kompas.

C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang Pleno ke-8 APA, yaitu:

- Menegaskan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya untuk mendorong kemajuan organisasi APA dan peran aktif APA di kawasan Asia di masa-masa mendatang
- Menyatukan visi dan misi negara-negara anggota APA dalam usaha untuk mencari solusi atas isu-isu krusial yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota APA
- Mendorong parlemen anggota APA untuk saling bertukar pandangan dan pengalaman terbaik dalam menghadapi isu-isu di kawasan
- Mendorong upaya-upaya harmonisasi legislasi terhadap isu-isu yang menjadi perhatian bersama di negara-negara anggota APA
- Menghasilkan laporan dan rekomendasi-rekomendasi mengenai isu-isu di kawasan Asia

II. AGENDA SIDANG

Agenda Sidang Pleno ke-8 APA ini sebagai berikut:

1. *Adoption of Agenda of the 8th Plenary Session*
2. *Election of Bureau of Plenary and Chairpersons of Standing Committees*
3. *Transfer of APA Presidency from Senate of Pakistan to the National Assembly of Kingdom of Cambodia*
4. *Statement by Honorable Mr. Mian Raza Rabbani, Chairman of the Senate of Pakistan to hand over the APA Presidency to Honourable Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG Samrin, President of the National Assembly*
5. *Statement by Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG Samrin, President of the National Assembly of Cambodia and APA President*
6. *Address by H.E. Dr. Nejad Hosseinian, Secretary General of APA*
7. *Address by Honorable Dr. Haddad Adel, First President of APA*
8. *Address by H.E. Jose de Venecia, Co-Chairman of ICAPP and one of the Founders of APA (TBC)*
9. *Report by Honorable Mr. Mian Raza Rabbani, Chairperson of the 2nd Executive Council*
10. *Report by H.E. Dr. Nejad Hosseinian, Secretary General of APA, on the work of APA*
11. *General Debate: "Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia"*
12. *Meeting of the Standing Committees*
13. *Meeting of Special Committee of APA Women Parliamentarians*
14. *Meeting of APA and ICAPP Representatives*
15. *Meeting of Ad-hoc Committee on APA Staff and Financial Regulations*
16. *Meeting of Special Committee for Creation of Asian Parliament*
17. *Meeting of Drafting Committee on Phnom Penn Declaration*
18. *Remarks by H.E. Dr. NGUON Nhel, Second Vice-President of the National Assembly and Chairman of the Organizing Committee (OC)*
19. *Presentation of reports by the Chairpersons of:*
 - a. *Standing Committee on Political Affairs*
 - b. *Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs*
 - c. *Standing Committee on Social and Cultural Affairs*
 - d. *Special Committee Meeting on Creation of AP*
 - e. *Meeting of APA and ICAPP Representatives*

- f. *Ad-hoc Committee Meeting on Staff and Financial Regulations*
 - g. *Meeting of APA Women Parliamentarians*
20. *Adoptions of APA Resolutions and Decisions*
 21. *Adoptions of the Report of 8th Plenary Session and Phnom Penh Declaration*
 22. *Announcement by Cambodia to host the next APA Plenary.*
 23. *Any other matters*
 24. *Closing Session.*

III. ISI LAPORAN

A. Jalannya Persidangan

The 2nd Executive Council Meeting tanggal 8 Desember 2015

Wakil Ketua Parlemen Kamboja/ Ketua *Organizing Committee*, Dr. Nguon Nhel dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para anggota APA dalam pertemuan ini yang merefleksikan dukungan terhadap Parlemen Kerajaan Kamboja selaku tuan rumah. Tema Sidang APA kali ini adalah "*Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia*" yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kawasan Asia yang lebih stabil dan harmonis. Dengan menjadi tuan rumah Sidang APA, Kamboja telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung diplomasi parlemen dan telah berperan penting dalam mengupayakan penyelesaian isu-isu global.

Presiden APA tahun 2013-2015 yakni Ketua Senat Pakistan, H.E. Mr. Mian Raza Rabbani memimpin *Executive Council Meeting* dan secara resmi membuka pertemuan ini. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemerintahan yang berdaulat demi terwujudnya Parlemen Asia.

Wakil Sekjen APA, Dr. Masoud Islami dalam sambutannya mengharapkan agar pembahasan Draft Resolusi dalam *Standing Committee Meeting* difokuskan pada aspek-aspek non-substansial, karena pada dasarnya, seluruh Draft Resolusi telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Ad-Hoc Working Groups Meeting tanggal 8 Desember 2015

Pertemuan *Ad-Hoc Working Groups* diselenggarakan berdasarkan persetujuan dari *Executive Council*. Wakil Sekjen APA Dr. Sayedali Mahmoudi dalam sambutannya menyatakan bahwa ketiga isu yang akan dibahas pada dasarnya sudah sangat sering dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan APA.

Mengenai penyelundupan benda-benda budaya, APA telah menyusun Draft Resolusi mengenai "*Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia*" yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya aksi kejahatan terhadap warisan budaya. Pertemuan *Social and Cultural Standing Committee* yang akan diselenggarakan pada 2016 diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah strategis menuju harmonisasi kebijakan, antara lain dengan penyusunan legislasi yang sama. Ada

tanggung jawab moral untuk menghargai warisan budaya dan tradisi yang kita miliki serta memberikan peluang pada pihak eksekutif agar lebih aktif dalam melindungi objek-objek tersebut. Saat ini, ada upaya terstruktur untuk menghancurkan warisan-warisan budaya di daerah konflik, terutama di Timur Tengah. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya repatriasi benda-benda warisan budaya yang dicuri dan diselundupkan ke negara lain.

Draft resolusi berikutnya yang dibahas berjudul "*Asian Integration through Information and Communication Technology*". Salah satu Parlemen Anggota APA telah bersedia untuk melakukan riset/proyek percontohan Parlemen Asia virtual. Selanjutnya, akan diselenggarakan pertemuan lanjutan untuk membahas hal tersebut. Parlemen Asia virtual merupakan wadah informasi dalam bentuk website.

Berikutnya mengenai isu korupsi, belum ada realisasi yang efektif dari Draft Resolusi yang berjudul "*Asian Parliamentarians against Corruption*". Negara anggota APA perlu segera mengadopsi resolusi terkait guna merumuskan prioritas kerja dalam pemberantasan korupsi. Diperlukan anggota APA yang bersedia untuk melakukan studi/riset mengenai penyusunan regulasi anti korupsi. Selain itu, Sekretariat APA mengusulkan agar para anggota APA dapat menyampaikan pengalaman mereka dalam upaya melawan korupsi. Selanjutnya, APA mendorong adanya kerja sama regional untuk mempromosikan gerakan anti-korupsi serta pentingnya studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap birokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan ini, APA menggagas pembentukan *Asian Parliamentarians Against Corruption (APAC)* dan Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., turut serta berpartisipasi sebagai salah satu *founding fathers* APAC.

Inaugural Ceremony tanggal 9 Desember 2015

Wakil Ketua Parlemen Kamboja/ Ketua *Organizing Committee*, Dr. Nguon Nhel dalam sambutannya mengatakan bahwa perdamaian, stabilitas politik, dan rekonsiliasi merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, mewakili Sekjen APA, Dr. Masoud Islami menyatakan bahwa diplomasi parlemen telah menjadi salah satu dimensi utama dalam ranah hubungan internasional saat ini. Parlemen memiliki peran yang lebih aktif baik dalam isu domestik maupun internasional.

Perdana Menteri Kamboja, H.E. Mr. Hun Sen juga turut memberikan sambutan. Beliau menekankan bahwa dari aspek historis, Kamboja sudah sangat berpengalaman dalam upaya penyelesaian konflik internal, menjaga perdamaian dalam negeri, perlindungan HAM, dan pentingnya demokrasi. Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional, badan legislatif memiliki peran penting sebagai penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Presiden Senat Kamboja, H.E. Mr. Say Chhum menyampaikan bahwa konflik dan kekerasan memiliki dampak negatif terhadap kemanusiaan dan menghambat proses

pembangunan di segala sektor. Konflik domestik yang terjadi di suatu negara juga dapat berdampak pada negara tetangga dan kawasan. Perdamaian dan stabilitas regional juga akan terancam akibat konflik internal.

Presiden *National Assembly* Kamboja, H.E. Mr. Heng Samrin dalam sambutannya meyakini bahwa pertemuan parlemen se-Asia akan memberikan dampak positif terhadap upaya mengakhiri kekerasan dan beragam bencana yang menimpa kawasan ini. APA menekankan pentingnya prinsip-prinsip hidup berdampingan dan saling menghargai dalam upaya penyelesaian konflik. Dalam konteks globalisasi, negara-negara di dunia tidak dapat menghindari dari dampak geopolitik dan ekonomi regional. Oleh karena itu, APA sebaiknya membentuk protokol regional yang berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi negara-negara di kawasan dari dampak krisis regional.

Plenary Session tanggal 9 Desember 2015

Dalam pertemuan ini, Presiden APA 2013-2015, H.E. Mr. Mian Raza Rabbani menyerahkan jabatan Presiden APA kepada Presiden *National Assembly* Kamboja, H.E. Mr. Heng Samrin. Sidang Pleno dilanjutkan dengan agenda *General Debate "Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia"*. Dalam pertemuan ini, para Ketua Delegasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato.

Special Committee Meeting of APA Women Parliamentarians tanggal 9 Desember 2015

Dalam pertemuan ini, sidang membahas Draft Resolusi mengenai pembentukan *Special Committee of APA Women Parliamentarians* yang dijadwalkan untuk bertemu setiap tahunnya di sela-sela Sidang Umum APA. Pembentukan *Special Committee* ini merupakan usulan Indonesia yang disampaikan melalui pertemuan *Executive Council* APA di Jakarta pada 2010.

Special Committee Meeting on Creation of Asian Parliament tanggal 9 Desember 2015

Gagasan pembentukan Parlemen Asia diusulkan secara resmi oleh H.E. Syed Nayyer Hussain Bokhari, Ketua Senat Pakistan dan sekaligus Presiden APA 2013-2015, pada 2 Desember 2014 dalam pembukaan Sidang Pleno ke-7 APA. Alasannya, di balik perkembangan ekonomi yang sangat dinamis, menggembirakan dan membanggakan di Asia, kemakmuran ekonomi belum terbangun secara merata di antara negara-negara di kontinen ini. Transformasi APA menjadi sebuah Parlemen Asia melalui perubahan paradigma, diharapkan dapat memperbaiki kondisi Asia dari keterbelakangan. Berbagai hambatan yang ada tidak boleh menyurutkan niat untuk mewujudkan Parlemen Asia. Ada beberapa model Parlemen Asia yang diajukan oleh sekretariat APA, antara lain konsep Parlemen Asia sebagai forum konsultatif dan monitoring, yang tidak bertujuan untuk menyusun suatu kebijakan yang mengikat. Model yang lebih *advance* tentu saja konsep Parlemen Asia Legislatif yang bertujuan untuk menyusun kebijakan bersama. Langkah pertama dari perjalanan menuju pembentukan Parlemen Asia sesungguhnya sudah dimulai dengan membicarakannya di forum APA. Sekretariat APA juga sudah menyusun suatu

road map mengenai prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan Parlemen Asia. Namun, mayoritas Parlemen Anggota APA masih keberatan dengan *road map* tersebut.

Standing Committee on Political Affairs tanggal 10 Desember 2015

Dalam *Standing Committee on Political Affairs*, dibahas 4 rancangan resolusi yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya di Ankara, Turki. 4 rancangan resolusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Draft Resolution on Advancing Principles of Friendship and Cooperation in Asia*
2. *Draft Resolution on Mobilizing Interactions between APA and Asian Governments*
3. *Draft Resolution on Deploring Acts of Terrorism and Violent Extremism*
4. *Draft Resolution on Significant Political Developments in Asia*

Pertemuan Bilateral Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang dengan Wakil Ketua Supreme People's Assembly (SPA) Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) tanggal 9 Desember 2015

Di sela-sela rangkaian pertemuan, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang/ Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Agus Hermanto melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua *Supreme People's Assembly* (SPA) Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK), H.E. Mr. An Tong Chun pada 10 Desember 2015.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang menyampaikan apresiasi atas hubungan antara Indonesia dan RDRK yang telah terjalin semenjak kedua negara baru berdiri. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang menyampaikan harapannya agar hubungan yang erat tersebut dapat dikembangkan dalam kerja sama yang lebih erat di bidang kerja sama antar parlemen, saling kunjung antara anggota parlemen dan kerja sama di bidang perdagangan.

Terkait kunjungan antara anggota parlemen, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang menyampaikan niatan untuk melakukan kunjungan ke Pyongyang pada tahun 2016 dan mengundang Presiden Presidium SPA, yang pada bulan April telah menghadiri Komemorasi ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Perayaan ke-10 *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP), untuk kembali mengunjungi Indonesia pada tahun 2016.

Standing Committee on Economic and Sustainable Development tanggal 10 Desember 2015

Dalam *Standing Committee on Economic and Sustainable Development*, pertemuan membahas 5 rancangan resolusi yang telah disusun dalam pertemuan sebelumnya di Jakarta. Adapun, rancangan resolusi yang dibahas pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

1. *Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth*
2. *Draft Resolution on the Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals*
3. *Draft Resolution on Asia Integrated Energy Market*

4. *Draft Resolution on Environmental Issues*
5. *Draft Resolution on Poverty Eradication in Asia*

Pada pertemuan ini, seluruh parlemen anggota APA menyetujui seluruh rancangan resolusi yang ada tanpa amandemen yang merubah isi resolusi secara menyeluruh. Pada pertemuan ini, secara khusus Delegasi DPR RI menyampaikan komitmen Indonesia di bidang implementasi SDGs, pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Sekretariat APA juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang telah dilakukan oleh DPR RI dalam pertemuan *Standing Committee on Economical Affairs and Sustainable Development* yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015 di Jakarta serta menyerukan agar parlemen anggota lainnya juga mengambil langkah aktif serupa.

Pada pembahasan *Draft Resolution on the Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals*, Sekretariat APA mendorong para anggotanya untuk membentuk Panitia Kerja SDGs sebagaimana yang telah dilakukan DPR RI guna memantau upaya pencapaian SDGs.

Standing Committee on Social and Cultural Affairs tanggal 10 Desember 2015

Pada *Standing Committee on Socio-Cultural Affairs*, membahas 9 rancangan resolusi sebagai berikut:

1. *Draft Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia*
2. *Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia*
3. *Draft Resolution on Coordinating Meeting of APA Women Parliamentarians*
4. *Draft Resolution on Promoting Inter-Faith Dialogue and Harmony among World Religions*
5. *Draft Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia*
6. *Draft Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drugs Trafficking in Asia.*

Secara umum Delegasi DPR RI dan delegasi parlemen anggota yang hadir menyepakati untuk mengadopsi seluruh rancangan resolusi yang ada mengingat seluruh delegasi parlemen anggota yang hadir menilai bahwa rancangan resolusi tersebut telah menggambarkan secara lengkap isu-isu dan sejumlah tantangan di bidang sosial budaya di kawasan.

Namun demikian, adan perdebatan panjang terkait sejumlah isi dalam rancangan resolusi terkait perlindungan pekerja migran di Asia yang ditentang oleh delegasi parlemen dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Yordania dan Rusia dengan dasar bahwa banyak klausul dalam rancangan resolusi tersebut bertentangan dengan regulasi di dalam negeri masing-masing. Setelah perdebatan panjang, mengingat pentingnya isu perlindungan pekerja migran bagi kawasan, pertemuan sepakat menunda pembahasan rancangan resolusi tersebut pada pertemuan berikutnya.

Drafting Committee Meeting tanggal 11 Desember 2015

Hasil keluaran Sidang Pleno ke-8 adalah *Phnom Penh Declaration* yang dibahas sebelumnya dalam *Drafting Committee*. Pada intinya, deklarasi tersebut merangkum seluruh komitmen parlemen anggota APA pada sejumlah isu-isu yang menjadi perhatian utama, antara lain, terorisme dan ekstrimisme, pembangunan berkelanjutan dan komitmen untuk menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan.

Ad-Hoc Committee Meeting on APA Staff and Financial Regulation tanggal 11 Desember 2015

Menindaklanjuti pertemuan APA di Lahore, Pakistan, pada rangkaian Sidang Pleno ke-8 diselenggarakan juga *Standing Committee on Staff and Financial Regulations*, untuk secara khusus membahas pengaturan anggaran tahunan APA dan kontribusi setiap parlemen anggota sebagaimana terangkum dalam rancangan resolusi terkait isu finansial. Sebagian besar peserta pertemuan menyepakati penundaan pembahasan sampai tahun anggaran 2017 dan menunda adopsi rancangan resolusi terkait isu finansial dan kontribusi anggota sampai dilakukan diskusi lebih lanjut terkait hal tersebut. Delegasi parlemen Afghanistan turut menawarkan agar pertemuan khusus untuk membahas isu finansial APA dapat dilakukan di Kabul, Afghanistan.

Courtesy Call dengan Raja Kamboja tanggal 11 Desember 2015

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Agus Hermanto, bersama-sama dengan para Ketua Delegasi dari semua Parlemen Anggota APA yang hadir di Sidang Pleno ke-8 APA, menghadiri pertemuan dengan Raja Kamboja.

Closing Ceremony tanggal 11 Desember 2015

Wakil Ketua Parlemen Kamboja/ Ketua *Organizing Committee*, Dr. Nguon Nhel dalam sambutannya menyatakan bahwa 18 resolusi yang diadopsi melalui Sidang Pleno APA ke-8 merupakan upaya bersama dan komitmen dari para Delegasi yang mewakili masyarakat yang mencari perwujudan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat masing-masing negara. Sudah banyak resolusi APA yang diadopsi, tetapi masih sedikit yang diimplementasikan sepenuhnya. Dalam rangkaian acara *Closing Ceremony*, para Ketua Sidang Komisi juga menyampaikan laporan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Tiongkok/ Ketua *Standing Committee on Economic and Sustainable Development*, Hon. Mme. Zhao Baige menyatakan bahwa Tiongkok bersedia untuk menjadi tuan rumah *Standing Committee on Economic and Sustainable Development*. Dalam rangkaian *Closing Ceremony* APA, diadopsi pula Deklarasi Phnom Penh.

Presiden *National Assembly* Kamboja/ Presiden APA 2015-2017, H.E. Mr. Heng Samrin memberikan pidato penutupan. Beliau menyampaikan penghargaan atas capaian yang sudah diraih APA dalam rangkaian Sidang Pleno APA ke-8. Selanjutnya beliau juga menekankan bahwa APA sudah menjalankan tugasnya atas dasar prinsip persahabatan dan kolaborasi yang erat dari para anggota. Perdamaian di kawasan Asia dan dunia merupakan faktor utama untuk menunjang pembangunan nasional. Kawasan Asia sudah mengalami

krisis selama tiga dekade terakhir yang disebabkan oleh bencana kelaparan, penyakit epidemi, embargo, dan konflik dengan kekerasan. Prinsip perdamaian dan non-kekerasan dapat menjawab tantangan tersebut. Tema Sidang Pleno kali ini, yaitu mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi dan dialog merefleksikan situasi dan kondisi yang saat ini dibutuhkan di Asia. Parlemen bukan hanya merupakan pihak yang merumuskan UU dan mengawasi implementasinya, tetapi Parlemen merupakan entitas politik yang juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keberlanjutan kebijakan yang pro rakyat. Parlemen harus berperan aktif dalam mencegah konflik bersenjata dan membuka jalan menuju perdamaian.

B. Partisipasi Delegasi DPR-RI

Delegasi DPR-RI sangat berpartisipasi aktif di setiap sesi sidang. Pada *the 2nd Executive Council Meeting*, Delegasi Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, H. Rofi' Munawar, Lc., dan Sumail Abdullah. Dalam pertemuan ini, **H. Rofi' Munawar, Lc.**, menyampaikan intervensi secara khusus mengenai isu terorisme yang akan dibahas dalam Pertemuan Standing Committee Politik. Beliau menekankan bahwa permasalahan yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa pelaku terorisme tersebut, tetapi apa latar belakangnya dan siapa yang ada dibaliknya. Gerakan seperti ini hilang dan timbul, karena di balik gerakan terorisme yang masif, kemungkinan ada oknum tertentu/negara besar yang mendukungnya. Hal inilah yang harus kita tekankan. Tidak boleh ada negara manapun yang mendukung gerakan/kelompok terorisme. Indonesia akan menyampaikan usulan amandemen terhadap resolusi terkait.

Pada *Ad-Hoc Working Groups Meeting*, Delegasi Indonesia diwakili oleh Dr. Zulkieflimansyah, M.Sc., dan Sumail Abdullah. Dalam pertemuan ini, **Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.**, menyampaikan intervensinya pada pembahasan mengenai "*Asian Parliament Virtual*" yakni bahwa gagasan integrasi Asia melalui ICT sangat baik, namun pertanyaan dasarnya adalah, apakah ICT yang dimaksudkan merupakan pembuatan website yang terbuka khususnya bagi para anggota APA untuk saling berbagi informasi; atau merupakan perwujudan ICT yang lebih implementatif. Selanjutnya, apakah sudah ada negara anggota APA yang telah mengimplementasikan *Virtual Parliament*? Apabila ada yang telah mengimplementasikan *Virtual Parliament*, mohon dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang telah dilakukan, sehingga konsep tersebut dapat digunakan pula untuk mengintegrasikan parlemen daerah dan parlemen nasional. Menanggapi hal tersebut, ketua sidang Pertemuan Ad-Hoc mengusulkan agar setiap negara anggota APA mengirimkan keterangan mengenai *best practices* masing-masing negara dalam menerapkan Parlemen Virtual.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang/ Ketua Delegasi DPR RI, **Dr. Agus Hermanto**, berkesempatan memberikan pidato pada sesi *Plenary Session*. Dalam pidatonya menekankan bahwa terorisme masih menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas. Prinsip-prinsip toleransi dan dialog antar umat beragama dapat melawan penyebaran paham radikalisme. Berbagai perbedaan yang ada, bukan merupakan hambatan, tetapi sebaliknya, aset bagi terciptanya peri kehidupan yang layak bagi semua pihak. Goal ke-16 SDGs merefleksikan komitmen parlemen, sebagai bagian dari komunitas internasional,

untuk mempromosikan terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, DPR RI menolak pembentukan Parlemen Asia mengingat disparitas ekonomi yang tajam serta perbedaan sistem antar negara-negara di Asia, dan belum adanya perdamaian yang stabil di Timur Tengah.

Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., mewakili Delegasi Indonesia menghadiri pertemuan *Special Committee Meeting of APA Women Parliamentarians* dengan agenda diskusi mengenai pemberdayaan anggota parlemen perempuan, SDGs dan kesetaraan gender. Beliau menyampaikan intervensi mengenai program pemberdayaan perempuan. Diperlukan suatu forum bagi para anggota parlemen perempuan untuk saling berbagi dan berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan biasanya identik dengan isu-isu sosial. Namun dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan, diperlukan keterlibatan perempuan di segala bidang.

Anggota Delegasi DPR RI, **Sumail Abdullah** menghadiri pertemuan *Standing Committee on Political Affairs* dengan agenda pembahasan sejumlah Draft Resolusi. Beliau menambahkan sejumlah amandemen pada *Draft Resolution on Deploring Acts of Terrorism and Violent Extremism* yang kemudian disetujui oleh seluruh peserta pertemuan, yaitu:

- Pentingnya pendekatan deradikalisasi dan dialog antar umat beragama untuk menyempurnakan pendekatan keamanan dalam kerja sama pemberantasan terorisme.
- Disamping itu, Delegasi DPR RI juga mengusulkan agar parlemen anggota APA terus mendorong *sharing of experiences* di bidang pemberantasan terorisme antar negara di Asia, dimana salah satunya melalui deradikalisasi dan promosi dialog antar umat beragama. Proposal tersebut didukung sepenuhnya oleh tuan rumah Kamboja, walaupun bagi delegasi lainnya, konsep deradikalisasi masih diperdebatkan karena dianggap sebagai konsep yang belum dikenal.
- Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dalam mengimplementasikan upaya-upaya untuk menentukan nasib sendiri.
- Delegasi DPR RI juga menyampaikan penolakannya atas segala upaya mengasosiasikan aksi terorisme dengan agama, etnis maupun kebangsaan manapun.

Anggota Delegasi DPR RI, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menghadiri pertemuan *Standing Committee on Social and Cultural Affairs* yang salah satu agendanya adalah pembahasan *Draft Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia*. Beliau menyatakan dukungannya terhadap paragraf yang merujuk pada rusaknya warisan budaya Palestina akibat pendudukan Israel. Menurutnya, isu mengenai warisan budaya Islam bukan hanya mewakili kepentingan Timur Tengah tetapi juga negara-negara di wilayah lain seperti Indonesia yang memiliki penduduk Muslim dalam jumlah besar.

Pada *Standing Committee on Economic and Sustainable Development*, Anggota Delegasi DPR RI, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menyampaikan beberapa intervensi yakni:

- Dalam pembahasan *Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth*, mengenai pentingnya aspek inovasi teknologi dalam mendorong

- pertumbuhan ekonomi, karena selama ini, pembangunan ekonomi lebih banyak dilihat dari sudut pandang kuantitatif;
- Dalam pembahasan *Draft Resolution on Asian Integrated Energy Market*, menyepakati pentingnya energi terbarukan, karena masa depan Asia tidak hanya tergantung pada sumber energi konvensional, tetapi juga sumber energi alternatif;
 - Dalam pembahasan *Draft Resolution on Poverty Eradication*, beliau merujuk kepada konsep pembangunan yang diformulasikan oleh Amartya Sen. Pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita dsb., tetapi juga dari upaya membangun kapasitas masyarakat. Saat ini kita sering menemukan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam. Karena itu, indeks kebahagiaan juga perlu dibahas. Pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan peningkatan kebahagiaan.

Dalam *Drafting Committee Meeting* untuk membahas *Phnom Penh Declaration*, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., secara khusus menekankan pentingnya pemenuhan SDGs dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Ketua Delegasi Dr. Agus Hermanto dan Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menghadiri *Ad-Hoc Committee on Staff and Financial Regulations*. Salah satu isu yang krusial adalah rencana pemberlakuan kontribusi tahunan bagi para anggota APA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah populasi. Indonesia dalam proposal yang diajukan oleh Sekretariat APA akan dikenakan kontribusi sekitar 58 ribu USD. Dalam Sidang Pleno APA ke-7 di Lahore, Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyetujui usulan tersebut. Namun dengan mempertimbangkan situasi terkini, Ketua Delegasi DPR RI menyampaikan keberatannya atas dorongan pihak Sekretariat untuk mengimplementasikan kewajiban bagi parlemen anggota APA untuk membayar sejumlah biaya kontribusi. Mengingat perbedaan tahun anggaran dan regulasi di setiap negara, Delegasi DPR RI menyampaikan pandangan bahwa perlu waktu dan koordinasi yang lebih lanjut di tiap parlemen anggota APA untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Posisi Indonesia tersebut didukung oleh sebagian besar peserta pertemuan seperti Vietnam, Turki dan Pakistan.

C. Hasil-hasil yang dicapai

Sidang Pleno ke-8 APA ini telah menghasilkan total 18 resolusi dan Phnom Penh Declaration yang mencakup seluruh komitmen bersama parlemen anggota APA dalam menjawab sejumlah tantangan bersama di kawasan Asia. Phnom Penh Declaration menekankan bahwa kawasan Asia memiliki kekayaan budaya dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekstremisme dan terorisme tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh dikaitkan dengan budaya atau agama tertentu. Upaya moderasi dan deradikalisasi harus dilakukan dengan melibatkan generasi muda dan sektor swasta serta dengan memahami penyebab radikalisme, ekstremisme dan terorisme. APA juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip Piagam PBB dan instrumen serta konvensi internasional lainnya dalam menyelesaikan konflik internasional.

Standing Committee on Political Affairs

1. Resolution on Advancing Principles of Friendship and Cooperation of Asia

Melalui Resolusi ini, para anggota APA mengakui bahwa hubungan yang baik antar bangsa Asia, Parlemen dan Pemerintah merupakan aset politik. Demokrasi dan perlindungan HAM merupakan prinsip utama yang harus ditekankan dalam mempererat kerja sama regional. Anggota Parlemen APA diminta untuk mempromosikan pentingnya kerja sama Asia kepada masyarakat luas melalui media pemerintah maupun media yang dijalankan oleh pihak swasta, terutama berkaitan dengan *APA Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia*.

2. Resolution on Mobilizing Interactions between APA and Asian Governments

Resolusi ini menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat antara Parlemen anggota APA dan pihak pemerintah. APA juga mendorong adanya kelompok kerja yang berfungsi untuk memantau proses implementasi resolusi APA oleh para anggotanya serta mendorong kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun NGO.

3. Resolution on Deploring Acts of Terrorism and Violent Extremism

Melalui Resolusi ini, para parlemen anggota APA menyadari bahwa terorisme dan ekstremisme yang diiringi dengan kekerasan, masih menjadi ancaman bagi stabilitas global yang juga mempengaruhi pembangunan. Kekerasan yang dilakukan oleh organisasi teroris tidak boleh disangkutpautkan dengan agama apapun.

4. Resolution on Significant Political Developments in Asia

APA mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk menjunjung tinggi perdamaian dan menjaga stabilitas politik di semenanjung Korea. Para anggota APA juga mengutuk kekerasan yang tengah dan terus terjadi di Suriah, Irak, dan Palestina. Selain itu, di berbagai belahan dunia, terorisme dan konflik yang disertai kekerasan masih terus terjadi. APA mendorong para pihak yang terlibat untuk mengutamakan proses rekonsiliasi dan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik.

Standing Committee on Economic and Sustainable Development

5. Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth

Para anggota APA menyepakati pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih inovatif untuk membangun perekonomian yang lebih seimbang dan berkelanjutan, antara lain melalui industri perbankan multilateral yang dipimpin oleh negara-negara Asia, dan

membentuk suatu protokol sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. APA juga mendorong para anggotanya untuk mendukung pengimplementasian SDGs, research and development, ekonomi rendah karbon, dan mendorong reformasi institusi finansial dan perbankan global.

6. *Resolution on the Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals*

Resolusi ini menekankan pentingnya peran parlemen dalam pencapaian SDGs. Kebijakan nasional harus diselaraskan dengan implementasi SDGs. Dalam pertemuan ini, APA melalui Sekretariatnya mendorong para anggotanya untuk membentuk Panitia Kerja SDGs sebagaimana yang telah dilakukan DPR RI guna memantau upaya pencapaian SDGs.

7. *Resolution on Asian Integrated Energy Market*

APA berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan antara produsen dan konsumen energi serta mengurangi biaya energi di kawasan Asia. APA juga mengakui pentingnya kebijakan energi yang ramah lingkungan dan penggunaan energi secara berkelanjutan. APA juga mendorong pembentukan Asian Integrated Energy Market. Delegasi Saudi berpendapat bahwa Draft Resolusi ini masih mengacu pada sumber energi konvensional. Agar lebih komprehensif, sumber energi alternatif seperti energi matahari, angin, dan nuklir.

8. *Resolution on Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia*

Konsep pembangunan berkelanjutan bergantung pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan. APA mendorong para anggotanya untuk berkomitmen terhadap upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menerima prinsip-prinsip yang disepakati melalui Protokol Kyoto. Isu-isu lingkungan yang dibahas dalam SDGs juga harus ditindaklanjuti dengan menyusun legislasi yang sesuai.

9. *Resolution on Poverty Eradication*

APA menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan untuk memerangi terorisme, penyelundupan narkoba, senjata, penyelundupan manusia, perompakan dan kejahatan transnasional. Cita-cita MDGs hingga akhir tahun 2015 untuk mengentaskan kemiskinan belum dapat terpenuhi, sehingga upaya tersebut perlu dilanjutkan dalam kerangka SDGs.

Standing Committee on Social and Cultural Affairs

10. *Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia*

Keragaman budaya bergantung pada perlindungan warisan budaya. Karakteristik Asia yang multibudaya perlu didukung oleh prinsip saling pengertian. Penyelundupan benda-benda warisan budaya merupakan ancaman terhadap kekayaan budaya Asia. APA mendorong adanya dialog antarbudaya dan antaragama yang melibatkan berbagai bangsa di Asia. APA juga mendorong upaya-upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat pedalaman sesuai dengan *UN Declaration on the Rights of Indigenous People*. APA mendorong para anggotanya untuk meratifikasi *International Convention for the Safeguarding of World Natural and Cultural Heritage and also the International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

11. *Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology*

Teknologi memainkan peran penting dalam proses pembangunan. *Virtual Asian Parliament* (VAP) akan menjembatani terciptanya forum untuk saling berbagi informasi dan harmonisasi legislasi. APA mendorong para anggotanya untuk memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan VAP serta mendukung pendidikan berbasis keahlian untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat dalam menghadapi globalisasi.

12. *Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia*

Ketidaksetaraan akses kesehatan terjadi akibat perbedaan kondisi sosial dari tiap individu. Ketimpangan sosial-ekonomi menimbulkan dampak negatif terhadap kelompok yang termarjinalisasi. Aspek kesehatan merupakan isu utama yang menjadi perhatian dalam agenda pembangunan global pasca-2015. APA menyerukan adanya kolaborasi di antara parlemen-parlemen anggota APA untuk mendiskusikan determinan sosial, terutama yang berhubungan dengan pendidikan, perumahan dan ketersediaan lapangan kerja. APA juga mendorong para anggotanya untuk mengupayakan kesetaraan dalam isu kesehatan, terutama melalui peningkatan kualitas, sistem pembiayaan keuangan serta asuransi kesehatan. Selain itu, APA juga mendorong para anggotanya untuk memperhatikan asupan gizi pada anak untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik.

13. *Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia*

APA mengakui bahwa pekerja migran masih sering menghadapi permasalahan seperti pelanggaran HAM, pelecehan dan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran perjanjian kerja. APA mendorong anggotanya untuk mengaksesi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* sekaligus meratifikasi *ILO Convention Concerning Decent Work*. Negara asal pekerja

migran harus membekali para pekerja dengan keahlian dan keterampilan yang memadai, serta pengetahuan mengenai budaya dan hukum di negara tujuan.

14. *Resolution on Asian Parliamentarians Against Corruption (APAC)*

APA mengakui perlunya repatriasi aset dan memerangi pencucian uang sesuai dengan prinsip-prinsip UNCAC. Mengingat pentingnya peran parlemen dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, APA mendukung pembentukan APAC.

15. *Resolution on Special Committee of APA Women Parliamentarians*

APA menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan dialog perdamaian. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong pembangunan ekonomi. Para anggota APA juga sepakat untuk membentuk Coordinating Meeting of APA Women Parliamentarians.

16. *Resolution on Promoting Interfaith Dialogue and Harmony among World Religions*

Dialog antaragama memiliki peranan penting dalam membangun harmoni dan kerja sama antarbangsa. Agama-agama di dunia pada dasarnya menyerukan perdamaian, toleransi dan saling pengertian. Terorisme, ekstremisme dan kekerasan tidak memiliki agama dan merupakan musuh bagi kemanusiaan. APA mendorong para anggotanya untuk mengimplementasikan diplomasi parlemen dalam rangka membangun kerangka internasional dan regional yang berfungsi untuk mempromosikan praktek-praktek cerdas dalam membangun harmoni antaragama.

17. *Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia*

APA menekankan pentingnya peran parlemen dalam menyusun kebijakan nasional guna melawan penyelundupan benda-benda warisan budaya. Para anggota APA diharapkan dapat menggunakan wewenang legislatifnya untuk mencegah dan menghukum para pelaku penyelundupan benda-benda warisan budaya. APA mendorong anggotanya untuk meratifikasi *UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* dan *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*.

18. *Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia*

Penyelundupan narkoba dapat digunakan untuk membiayai aktifitas organisasi teroris internasional. Anggota APA harus saling berkoordinasi untuk mengkaji aspek-aspek yang mempengaruhi penyelundupan narkoba. Masyarakat sipil adalah mitra utama

parlemen dalam menghentikan arus penyelundupan narkoba. APA juga menggarisbawahi pentingnya peranan media masa dalam upaya tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Delegasi Indonesia telah berpartisipasi sangat aktif dalam rangkaian Sidang Pleno APA ke-8 yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 7-12 Desember 2015, melalui intervensi dan sejumlah masukan amandemen resolusi.
2. Isu kejahatan transnasional, terutama yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme menjadi perhatian utama dalam sidang kali ini. Sehubungan dengan isu tersebut, Indonesia menekankan pentingnya langkah deradikalisasi. Kepentingan Indonesia ini juga terefleksi dalam Deklarasi Phnom Penh.
3. Dalam Sidang Pleno APA ke-8, para Anggota APA menyepakati terbentuknya *Coordinating Meeting of APA Women Parliamentarians* dan mendukung pembentukan *Asian Parliamentarians Against Corruption (APAC)*.
4. Dari hasil pengamatan, terdapat ketidakpuasan sejumlah delegasi parlemen anggota atas kepemimpinan pimpinan persidangan dan Sekretariat APA yang dianggap terlalu otoriter dan berupaya mendorong pertemuan pada agenda Sekretariat APA. Selama rangkaian pertemuan, terdapat kesan bahwa Sekretariat APA berupaya keras untuk mendorong terbentuknya *Asian Parliament (AP)*, yang diinisiasi oleh Pakistan pada Sidang Pleno APA ke-7 di Lahore, sebagai sebuah badan parlemen di kawasan Asia yang berdiri secara independen di luar APA dengan kewenangan lintas negara. Delegasi DPR RI menilai bahwa ide pendirian AP dengan sendirinya mengintrusi kedaulatan masing-masing negara anggota APA dan masih terlalu prematur untuk direalisasikan. Dalam kaitan dengan itu, Indonesia bersama dengan hampir seluruh delegasi parlemen anggota lainnya secara tegas sepakat untuk menolak pembahasan ide tersebut pada pertemuan.
5. Dari aspek keorganisasian, Sekretariat APA mendorong adanya kontribusi finansial tahunan yang besarnya dibebankan kepada setiap anggota APA berdasarkan populasi dan GDP masing-masing negara. Indonesia menyatakan keberatan terhadap ide tersebut. Mayoritas negara lainnya pun di persidangan turut memberikan dukungan.

B. Saran

1. Mengingat perkembangan pada pembahasan resolusi terkait perlindungan pekerja migran yang banyak dihambat oleh anggota parlemen dari negara-negara Teluk, Delegasi Parlemen RI pada pertemuan APA selanjutnya perlu terus mendorong pembahasan resolusi terkait isu perlindungan pekerja migran, terutama selama masa keketuaan Kamboja yang mengalami isu serupa terkait perlindungan pekerja migran.
2. Terkait ide pembentukan *Asian Parliament*, mengingat eratnya ide tersebut dengan isu kedaulatan, ke depannya, Indonesia perlu terus mengawasi perkembangan ide tersebut pada pertemuan APA mendatang.
3. Untuk mempersiapkan pembahasan lebih lanjut terkait kontribusi parlemen anggota pada pertemuan berikutnya, perlu didorong koordinasi internal antara DPR RI,

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan terkait kontribusi Indonesia pada APA. Mengingat proses koordinasi antar lembaga dan proses administrasi, sebaiknya proses tersebut sudah dimulai jauh sebelum pertemuan tersebut diselenggarakan.

4. Indonesia sebaiknya memantau perkembangan pembentukan *Coordinating Meeting of APA Women Parliamentarians* yang awalnya diusulkan oleh Indonesia sejak 2010.
5. DPR RI sebaiknya mempertahankan komitmennya untuk bekerjasama dengan Parlemen negara-negara Asia melalui APA.

V. PENUTUP

A. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilampiri dengan beberapa dokumen hasil sebagai berikut:

- *Report of the 8th Plenary Session of APA*
- *Agenda Items*
- *Program of Works*
- *List of Participants*
- *Phnom Penh Declaration*
- *Draft Resolutions*
- Dokumentasi Foto

B. Kata Penutup

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR-RI ke Sidang Pleno ke-8 APA yang telah berlangsung pada tanggal 7 - 12 Desember 2015 di Phnom Penh, Kamboja. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait (Kementerian Luar Negeri) seperti Duta Besar RI di Phnom Penh dan Duta Besar RI di Bangkok dan jajarannya atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama Delegasi DPR RI mengikuti Sidang Pleno ke-8 APA maupun selama berada di Phnom Penh dan pada waktu transit di Bangkok. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2015
Ketua Delegasi DPR RI,

Dr. Agus Hermanto